BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 000.8/134 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka perbaikan dan pengembangan Proses Bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk mendukung penyesuaian Mekanisme Kerja, maka diperlukan pedoman untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar Perangkat Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Karanganyar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Peta Proses Bisnis sebagaimana Diktum KESATU merupakan pedoman untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar Perangkat Daerah dalam rangka perbaikan dan pengembangan Proses Bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk mendukung penyesuaian Mekanisme Kerja.

KETIGA : Dengan ditetapkan Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nomor 061/1276 Tahun 2023 tentang Penetapan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Karanganyar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 1 Februari 2024

BUPATI KARANGANYAR,

ROBER CHRISTANTO

Tembusan :
1. Inspektur Daerah;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 000.8 /134 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PETA PROSES BISNIS
PEMERINTAH KA BUPATEN KARANGANYAR

PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Mewujudkan Karanganyar Sebagai Bumi Intanpari yang Berintegritas, Berdaya saing, dan Sejahtera	Proses Manajerial	
	P.1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
	Proses Utama	
	P.2	Meningkatkan Daya Saing Daerah
	P.3	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Semakin Merata
	Proses Lainnya	
	P.4	Meningkatkan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kewilayahan

Proses	Level 0		Level 1		Level 2		Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pengampu
Proses Manajerial	P.1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	P.1.1	Meningkatkan Manajemen ASN	P.1.1.1	Meningkatkan Pengelolaan Kepegawaian	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Unsur Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					P.1.1.2	Meningkatkan Pengembangan Kompetensi ASN		
			P.1.2	Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Inovasi Pembangunan Daerah	P.1.2.1	Meningkatkan Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Unsur Perencanaan	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
					P.1.2.2	Meningkatkan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		
					P.1.2.3	Meningkatkan Penelitian Dan Pengembangan Daerah		
			P.1.3	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	P.1.3.1	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Unsur Keuangan	Badan Keuangan Daerah
					P.1.3.2	Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah		
					P.1.3.3	Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
			P.1.4	Menyelenggarakan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi	P.1.4.1	Meningkatkan Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
					P.1.4.2	Meningkatkan Pengelolaan Aplikasi Informatika		
					P.1.4.3	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Sektoral	
					P.1.4.4	Meningkatkan Keamanan Informasi	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika

			P.1.5	Meningkatkan Pengelolaan Arsip	P.1.5.1	Meningkatkan Pengelolaan Arsip	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
					P.1.5.2	Meningkatkan Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip		
			P.1.6	Meningkatkan Pengendalian Intern Pemerintah	P.1.6.1	Meningkatkan Penyelenggaraan Pengawasan	Urusan Pengawasan	Inspektorat Daerah
					P.1.6.2	Meningkatkan Pendampingan Dan Asistensi Pengawasan Perangkat Daerah		
			P.1.7	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	P.1.7.1	Meningkatkan Administrasi Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Unsur Pemerintahan	Sekretariat Daerah
					P.1.7.2	Meningkatkan Tata Kelola Perekonomian Dan Pembangunan		
					P.1.7.3	Meningkatkan Pengelolaan Pendaftaran Penduduk	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					P.1.7.4	Meningkatkan Pengelolaan Pencatatan Sipil		
					P.1.7.5	Meningkatkan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
					P.1.7.6	Meningkatkan Pengelolaan Profil Kependudukan		
					P.1.7.7	Meningkatkan Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
					P.1.7.8	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kewilayahan	Kecamatan

					P.1.7.9	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		
					P.1.7.10	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum		
					P.1.7.11	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		
					P.1.7.12	Meninfkatkan Pembinaan Dan Pengawasan Kewilayahan		
			P.1.8	Meningkatkan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Masyarakat	P.1.8.1	Meningkatkan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja
					P.1.8.2	Meningkatkan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran		
					P.1.8.3	Menguatkan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Unsur Pemerintahan Umum Bidang Unsur Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					P.1.8.4	Meningkatkan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan		
					P.1.8.5	Meningkatkan Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		
					P.1.8.6	Meningkatkan Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya		

					P.1.8.7	Meningkatkan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik		
Proses Utama	P.2	Meningkatkan Daya Saing Daerah	P.2.1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	P.2.1.1	Meningkatkan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
					P.2.1.2	Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		
					P.2.1.3	Meningkatkan Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman		
					P.2.1.4	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		
			P.2.2	Meningkatkan Aksesbilitas Pendidikan	P.2.2.1	Meningkatkan Pengelolaan Pendidikan	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					P.2.2.2	Mengembangkan Kurikulum Pendidikan		
					P.2.2.3	Meningkatkan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga kependidikan		
					P.2.2.4	Mengendalikan Perizinan Pendidikan		
			P.2.3	Meningkatkan Pembangunan Literasi Masyarakat	P.2.3.1	Meningkatkan Pembinaan Perpustakaan	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
					P.2.3.2	Meningkatkan Kegemaran Membaca		

			P.2.4	Meningkatkan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	P.2.4.1	Meningkatkan Pengendalian Penduduk Daerah	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					P.2.4.2	Meningkatkan Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		
					P.2.4.3	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)		
			P.2.5	Meningkatkan Kesetaraan Gender	P.2.5.1	Meningkatkan Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					P.2.5.2	Meningkatkan Perlindungan Perempuan		
					P.2.5.3	Meningkatkan Peningkatan Kualitas Keluarga		
					P.2.5.4	Meningkatkan Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak		
					P.2.5.5	Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak (PHA)		
					P.2.5.6	Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak		
			P.2.6	Meningkatkan Pembangunan Pemuda dan Olahraga	P.2.6.1	Mengembangkan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
					P.2.6.2	Mengembangkan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan		
					P.2.6.3	Mengembangkan Kapasitas Kepramukaan		
			P.2.7	Meningkatkan Kemandirian Desa	P.2.7.1	Meningkatkan Penataan Desa	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

					P.2.7.2	Meningkatkan Kerjasama Desa	Dan Desa	
					P.2.7.3	Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa		
					P.2.7.4	Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat		
			P.2.8	Meningkatkan Pembangunan Kebudayaan	P.2.8.1	Mengembangkan Kebudayaan Daerah	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					P.2.8.2	Mengembangakan Kesenian Tradisional		
					P.2.8.3	Meningkatkan Pembinaan Sejarah		
					P.2.8.4	Meningkatkan Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya		
			P.2.9	Meningkatkan Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Daerah	P.2.9.1	Meningkatkan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
					P.2.9.2	Meningkatkan Pemasaran Pariwisata		
					P.2.9.3	Mengembangkan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Pelindungan Hak Kekayaan Interlektual (HKI)		
					P.2.9.4	Mengembangkan Sumberdaya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif		
			P.2.10	Meningkatkan Investasi Daerah	P.2.10.1	Mengembangkann Iklim Penanaman Modal	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					P.2.10.2	Meningkatkan Promosi		

						Penanaman Modal		
					P.2.10.3	Meningkatkan Pelayanan Penanaman Modal		
					P.2.10.4	Meningkatkan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		
					P.2.10.5	Meningkatkan Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal		
			P.2.11	Meningkatkan Produktivitas Pertanian dan Perikanan	P.2.11.1	Meningkatkan Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
					P.2.11.2	Meningkatkan Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian		
					P.2.11.3	Meningkatkan Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		
					P.2.11.4	Meningkatkan Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian		
					P.2.11.5	Meningkatkan Penyuluhan Pertanian		
					P.2.11.6	Meningkatkan Pengelolaan Perikanan Budidaya	Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan dan Kelautan	
					P.2.11.7	Meningkatkan Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan		
					P.2.11.8	Meningkatkan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan		

			P.2.12	Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	P.2.12.1	Meningkatkan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	
					P.2.12.2	Meningkatkan Penanganan Kerawanan Pangan		
					P.2.12.3	Meningkatkan Pengawasan Keamanan Pangan		
					P.2.12.4	Meningkatkan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan		
	P.3	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	P.3.1	Meningkatkan Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	P.3.1.1	Meningkatkan Pemberdayaan Sosial	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Dinas Sosial
					P.3.1.2	Meningkatkan Rehabilitasi Sosial		
					P.3.1.3	Meningkatkan Perlindungan Dan Jaminan Sosial		
					P.3.1.4	Meningkatkan Penanganan Bencana		
					P.3.1.5	Meningkatkan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		
			P.3.2	Menurunkan Pengangguran Terbuka	P.3.2.1	Meningkatkan Perencanaan Tenaga Kerja	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Dinas Perdagangan,Perindustrian dan Tenaga Kerja
					P.3.2.2	Meningkatkan Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja		
					P.3.2.3	Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja		
					P.3.2.4	Meningkatkan Hubungan Industrial		
					P.3.2.5	Meningkatnya Kepesertaan Transmigrasi	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral

			P.3.3	Meningkatkan Pembangunan Usaha Mikro dan Koperasi	P.3.3.1	Meningkatkan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral
					P.3.3.2	Meningkatkan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi		
					P.3.3.3	Meningkatkan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi		
					P.3.3.4	Meningkartkan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian		
					P.3.3.5	Meningkatkan Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi		
					P.3.3.6	Memberdayakan UMKM		
					P.3.3.7	Mengembangkan UMKM		
			P.3.4	Meningkatkan Potensi Produk dan Industri Kecil Menengah Daerah	P.3.4.1	Meningkatkan Pengelolaan Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja
					P.3.4.2	Meningkatkan Sarana Distribusi Perdagangan		
					P.3.4.3	Meningkatkan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting		
					P.3.4.4	Meningkatkan Dan Mengembangkan Ekspor Daerah		
					P.3.4.5	Meningkatkan Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen		
					P.3.4.6	Meningkatkan Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		
					P.3.4.7	Meningkatkan Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	

					P.3.4.8	Mengendalikan Pengendalian Izin Usaha Industri		
					P.3.4.9	Meningkatkan Pengelolaan Sistem Informasi Industri		
Proses Lainnya	P.4	Meningkatkan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kewilayahan	P.4.1	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	P.4.1.1	Meningkatkan Perencanaan Lingkungan Hidup	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
					P.4.1.2	Meningkatkan Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup		
					P.4.1.3	Meningkatkan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)		
					P.4.1.4	Meningkatkan Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah B3		
					P.4.1.5	Meningkatkan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan & Izin Perlindungan Dan PPLH		
					P.4.1.6	Meningkatkan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		
					P.4.1.7	Memberikan Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		
					P.4.1.8	Meningkatkan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		
					P.4.1.9	Meningkatkan Pengelolaan Persampahan		
					P.4.1.10	Meningkatkan Potensi Kawasan Energi Baru Terbarukan	Urusan Pemerintahan Bidang Energi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral

			P.4.2	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur	P.4.2.1	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
					P.4.2.2	Meningkatkan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		
					P.4.2.3	Meningkatkan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah		
					P.4.2.4	Meningkatkan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase		
					P.4.2.5	Meningkatkan Penataan Bangunan Gedung		
					P.4.2.6	Meningkatkan Pengembangan Jasa Konstruksi		
					P.4.2.7	Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang		
			P.4.3	Meningkatkan Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	P.4.3.1	Meningkatkan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Dinas Perhubungan
					P.4.3.2	Meningkatkan Penyelenggaraan Jalan	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			P.4.4	Meningkatkan Pembangunan Kawasan Strategis/ Perumahan/ Permukiman Pedesaan	P.4.4.1	Meningkatkan Pengembangan Perumahan	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
					P.4.4.2	Meningkatkan Kawasan Permukiman		
					P.4.4.3	Meningkatkan Penangulangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh		

					P.4.4.4	Meningkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)		
					P.4.4.5	Meningkatkan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman		
			P.4.5	Meningkatkan Wilayah Tangguh Bencana	P.4.5.1	Meningkatkan Penanggulangan Bencana	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					P.4.5.2	Meningkatkan Penanganan Pasca Bencana		

Peta Proses Bisnis Level 0

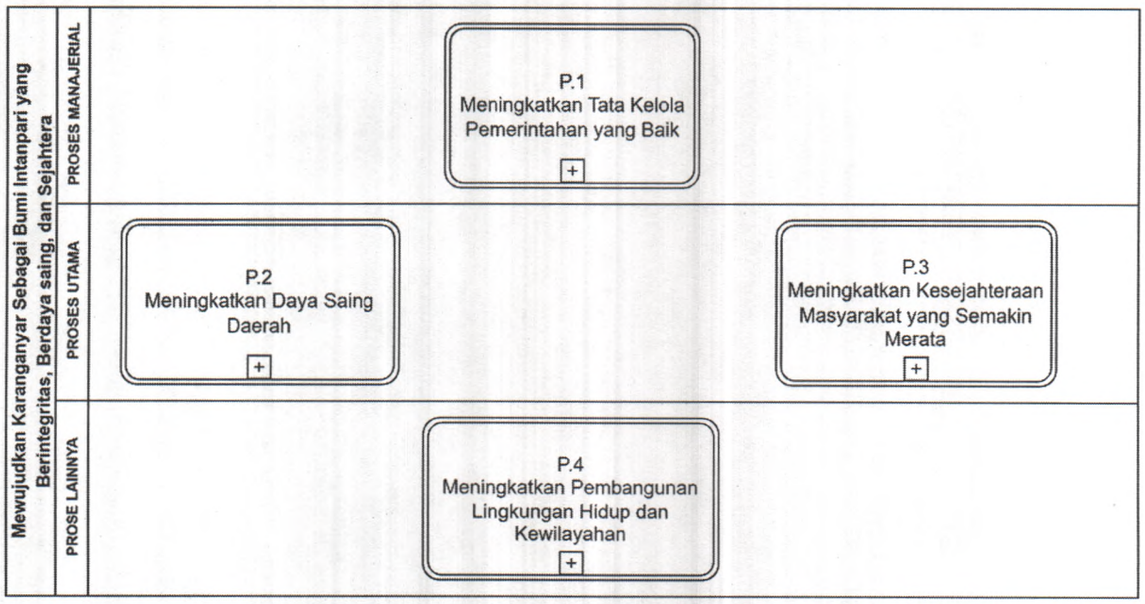

Peta Proses Bisnis Level 1

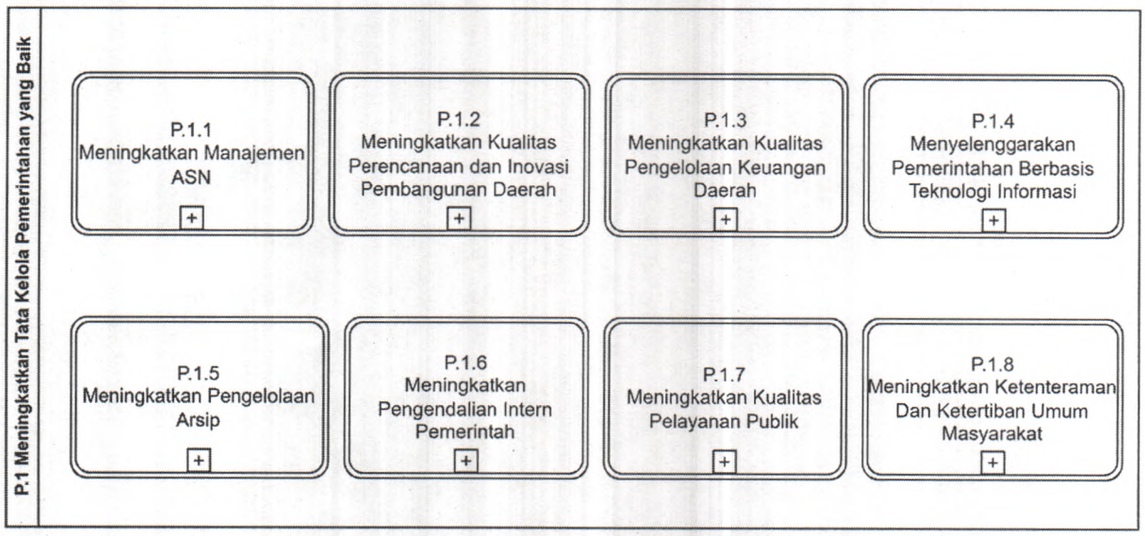

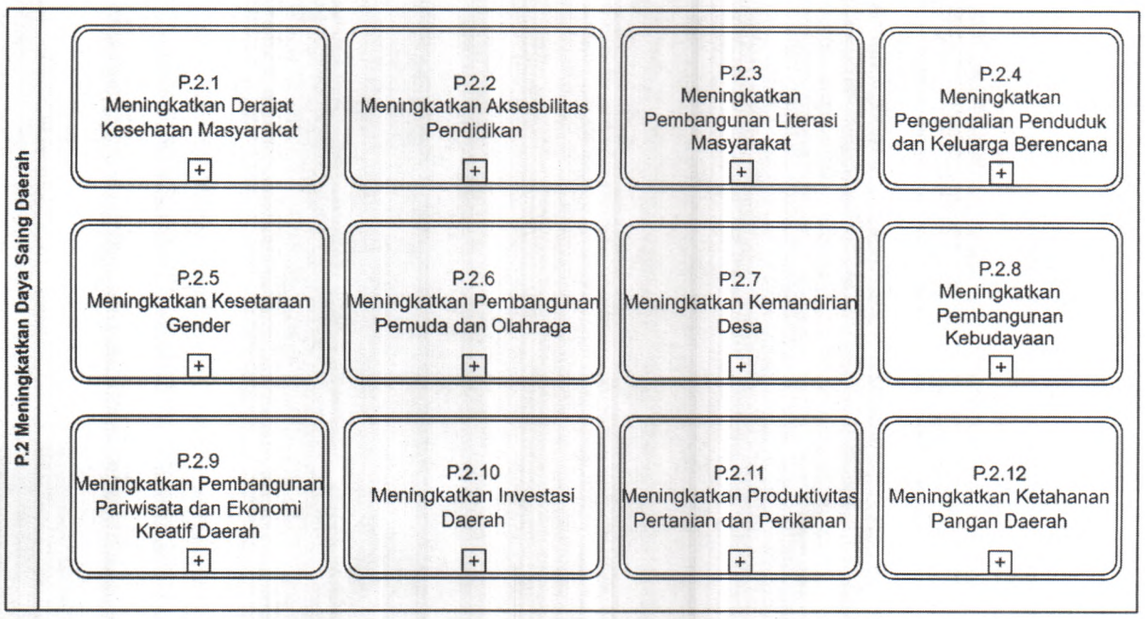

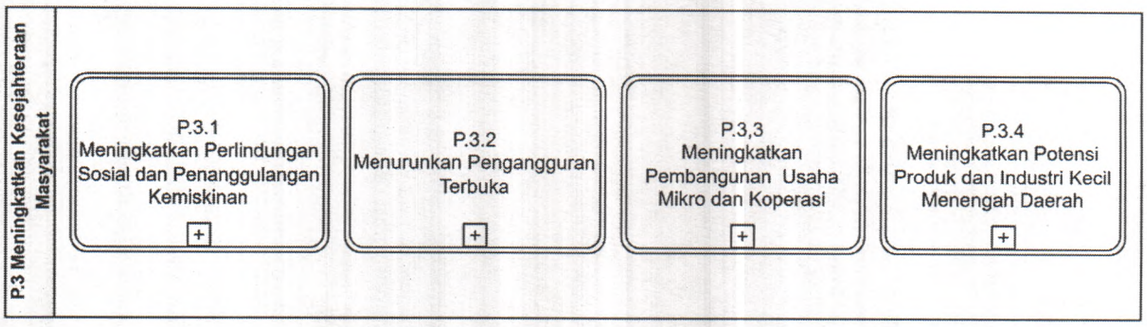

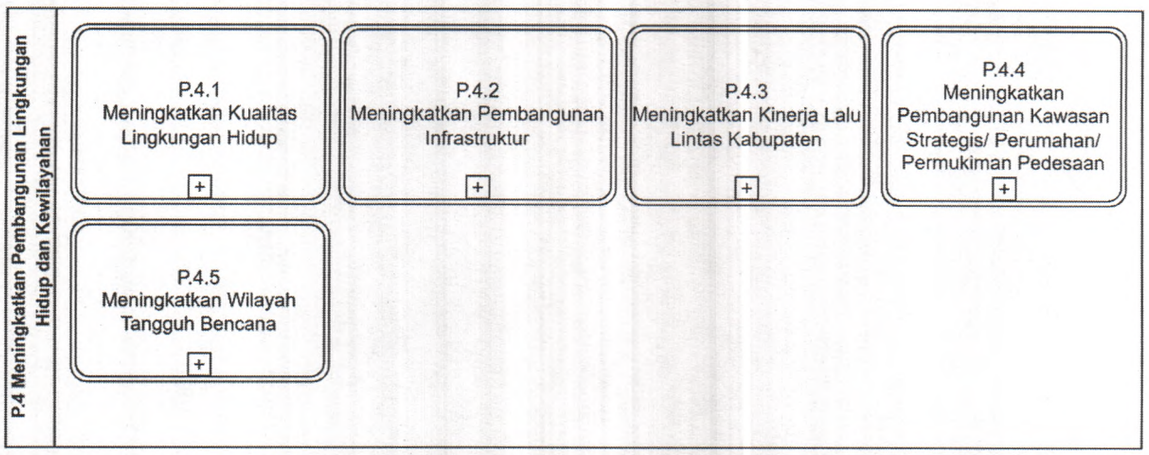

Peta Proses Bisnis Level 2

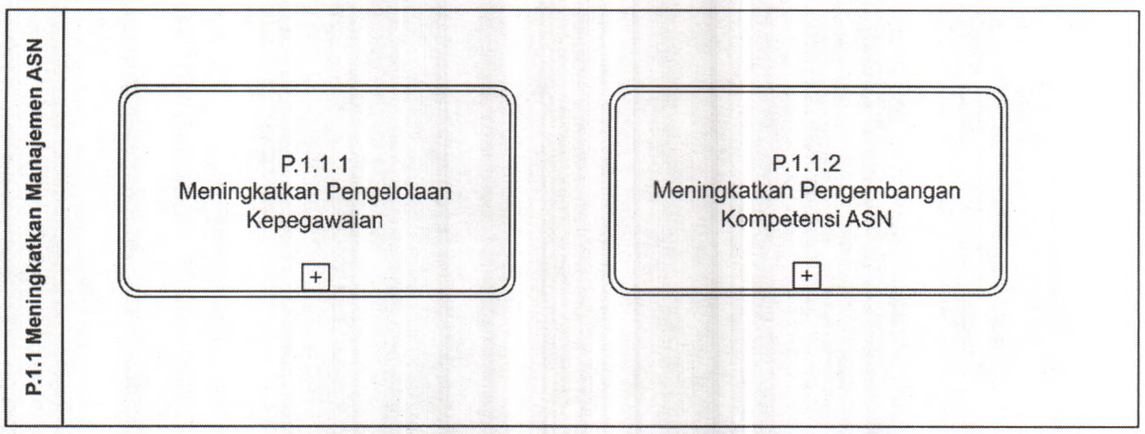

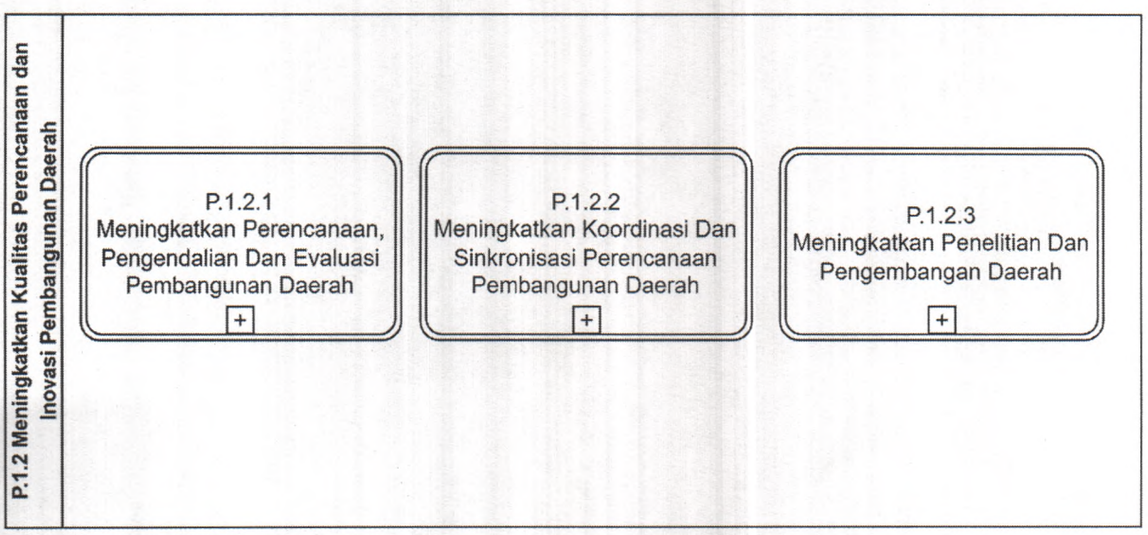

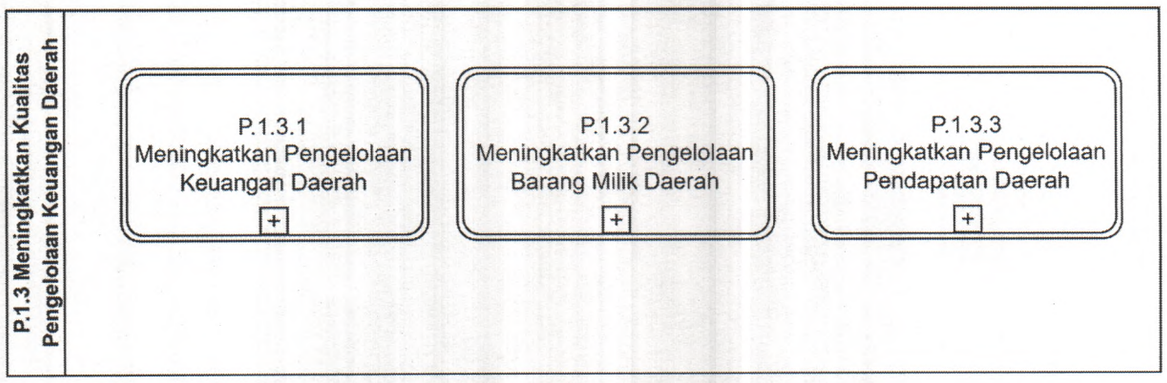
P.1.3 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
P.1.3.1
Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah
P.1.3.2
Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah
P.1.3.3
Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan Daerah

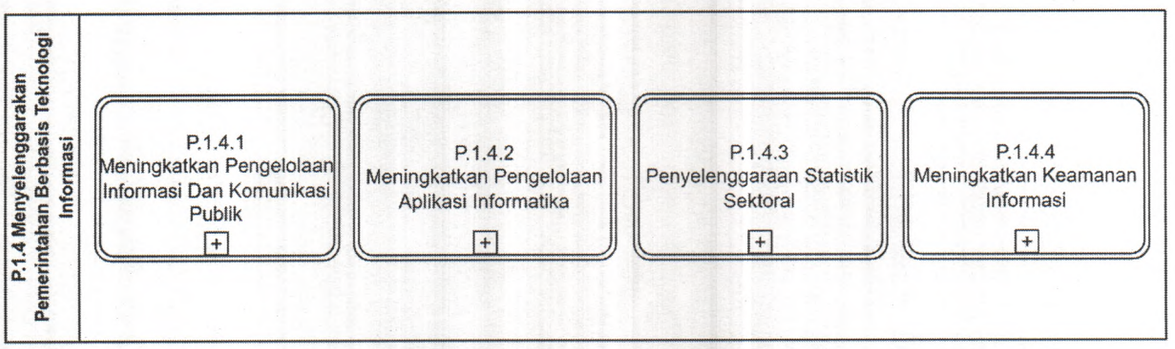
P.1.4 Menyelenggarakan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi
P.1.4.1
Meningkatkan Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
P.1.4.2
Meningkatkan Pengelolaan Aplikasi Informatika
P.1.4.3
Penyelenggaraan Statistik Sektoral
P.1.4.4
Meningkatkan Keamanan Informasi

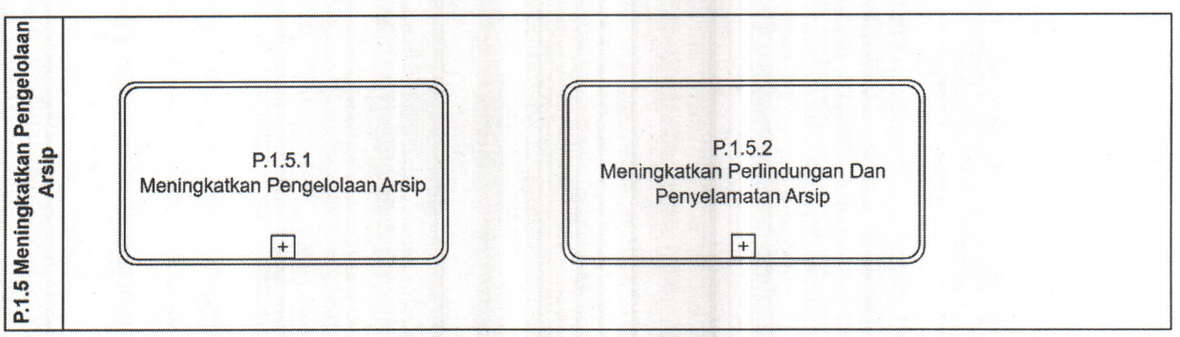
P.1.5 Meningkatkan Pengelolaan Arsip
P.1.5.1
Meningkatkan Pengelolaan Arsip
P.1.5.2
Meningkatkan Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip

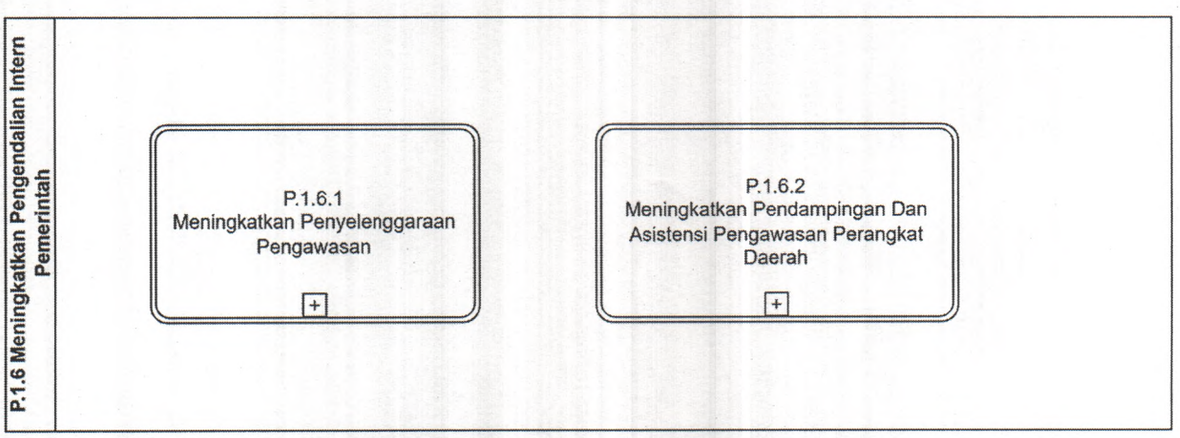
P.1.6 Meningkatkan Pengendalian Intern Pemerintah
P.1.6.1
Meningkatkan Penyelenggaraan Pengawasan
P.1.6.2
Meningkatkan Pendampingan Dan Asistensi Pengawasan Perangkat Daerah

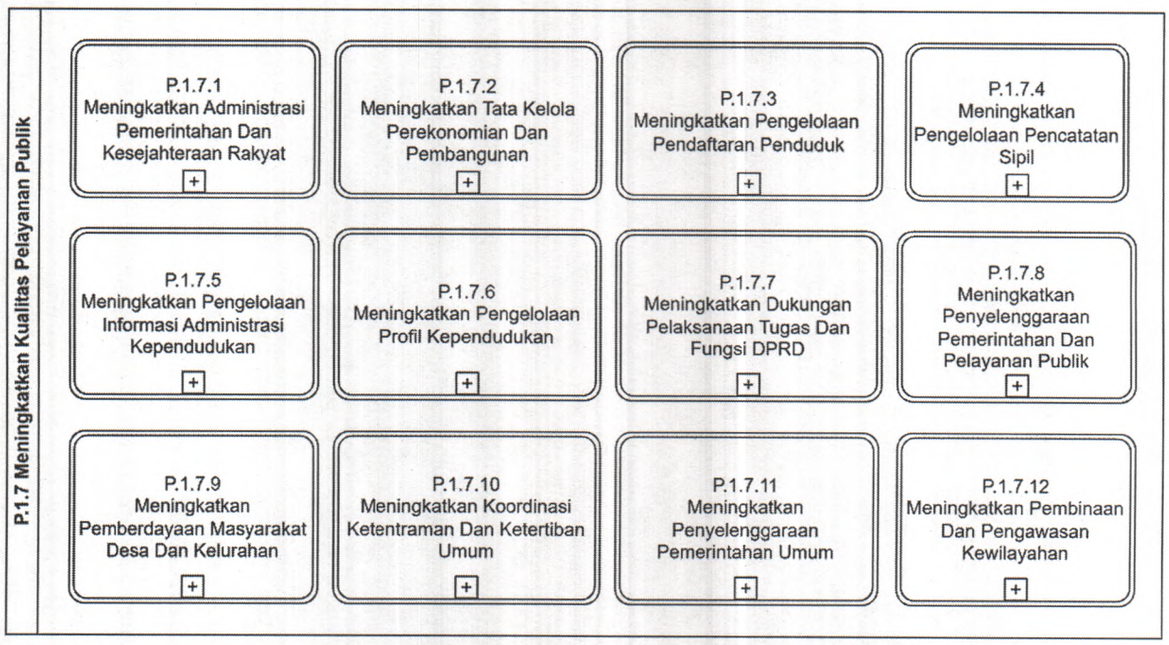
P.1.7 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
P.1.7.1 Meningkatkan Administrasi Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
P.1.7.2 Meningkatkan Tata Kelola Perekonomian Dan Pembangunan
P.1.7.3 Meningkatkan Pengelolaan Pendaftaran Penduduk
P.1.7.4 Meningkatkan Pengelolaan Pencatatan Sipil
P.1.7.5 Meningkatkan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
P.1.7.6 Meningkatkan Pengelolaan Profil Kependudukan
P.1.7.7 Meningkatkan Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
P.1.7.8 Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
P.1.7.9 Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
P.1.7.10 Meningkatkan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
P.1.7.11 Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
P.1.7.12 Meningkatkan Pembinaan Dan Pengawasan Kewilayahan

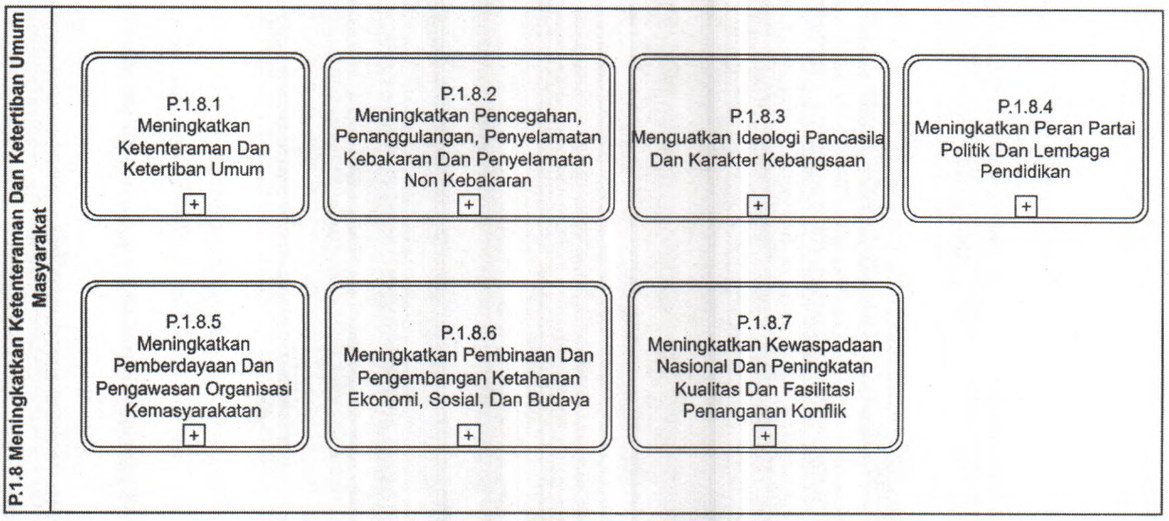
P.1.8 Meningkatkan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Masyarakat
P.1.8.1 Meningkatkan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
P.1.8.2 Meningkatkan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
P.1.8.3 Menguatkan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
P.1.8.4 Meningkatkan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan
P.1.8.5 Meningkatkan Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
P.1.8.6 Meningkatkan Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
P.1.8.7 Meningkatkan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik

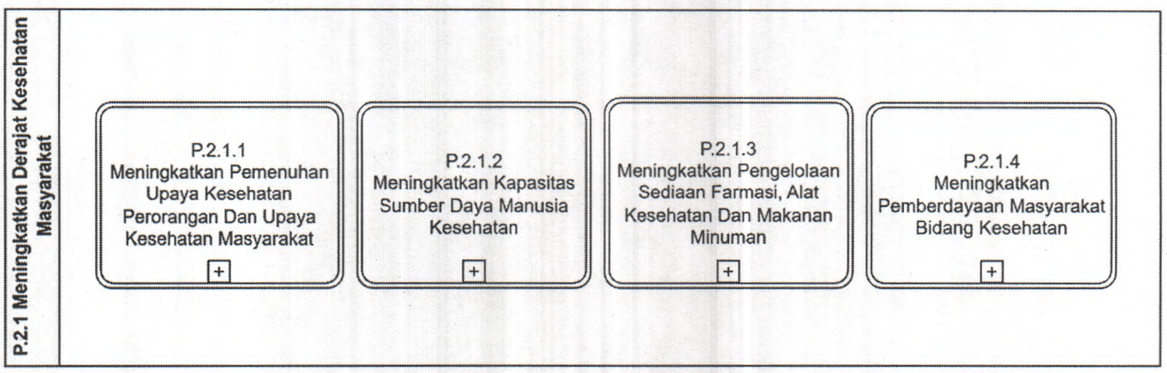
P.2.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
P.2.1.1 Meningkatkan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
P.2.1.2 Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
P.2.1.3 Meningkatkan Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
P.2.1.4 Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

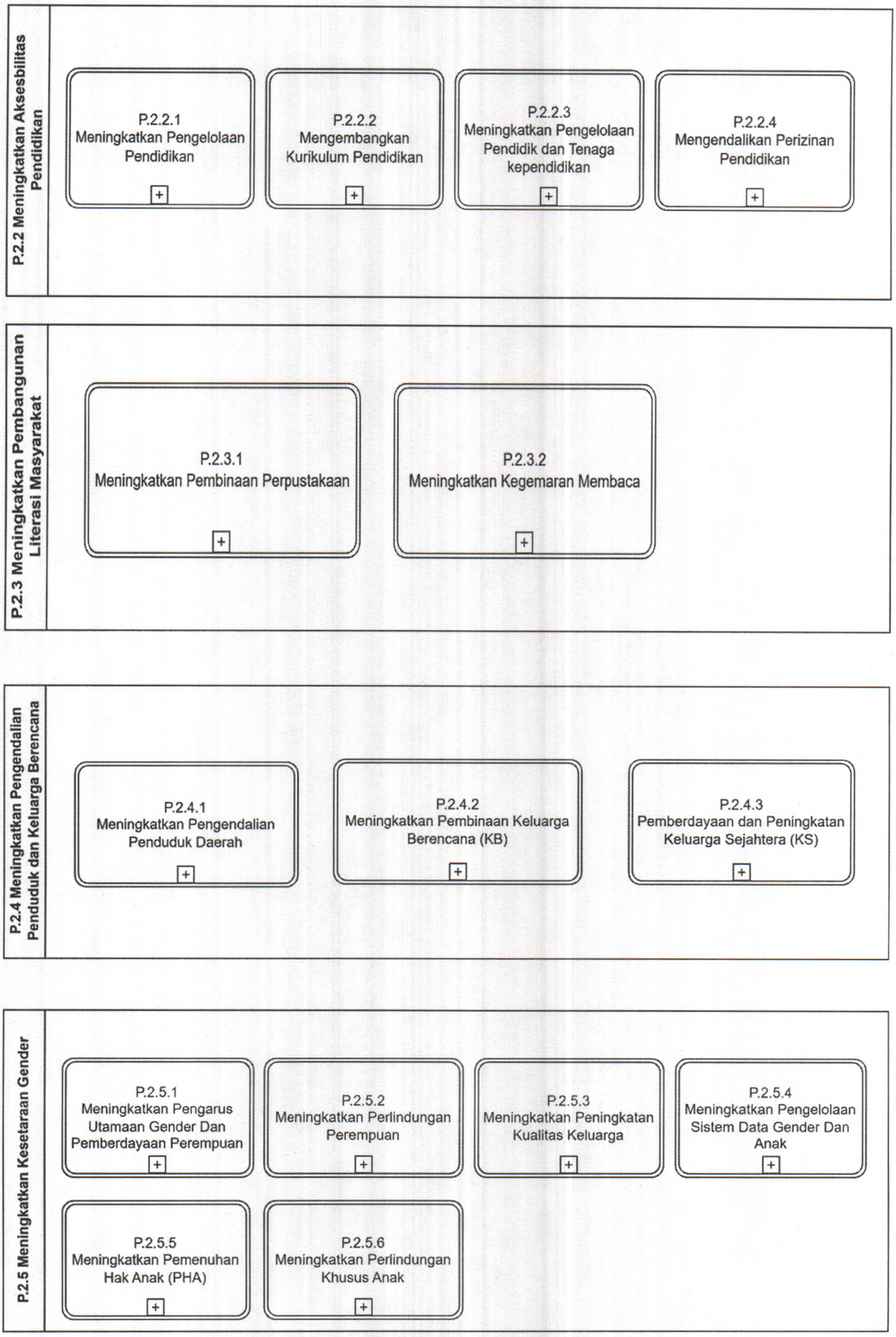
P.2.2 Meningkatkan Aksesbilitas Pendidikan
P.2.2.1 Meningkatkan Pengelolaan Pendidikan
P.2.2.2 Mengembangkan Kurikulum Pendidikan
P.2.2.3 Meningkatkan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga kependidikan
P.2.2.4 Mengendalikan Perizinan Pendidikan
P.2.3 Meningkatkan Pembangunan Literasi Masyarakat
P.2.3.1 Meningkatkan Pembinaan Perpustakaan
P.2.3.2 Meningkatkan Kegemaran Membaca
P.2.4 Meningkatkan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
P.2.4.1 Meningkatkan Pengendalian Penduduk Daerah
P.2.4.2 Meningkatkan Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
P.2.4.3 Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
P.2.5 Meningkatkan Kesetaraan Gender
P.2.5.1 Meningkatkan Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
P.2.5.2 Meningkatkan Perlindungan Perempuan
P.2.5.3 Meningkatkan Peningkatan Kualitas Keluarga
P.2.5.4 Meningkatkan Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
P.2.5.5 Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak (PHA)
P.2.5.6 Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak

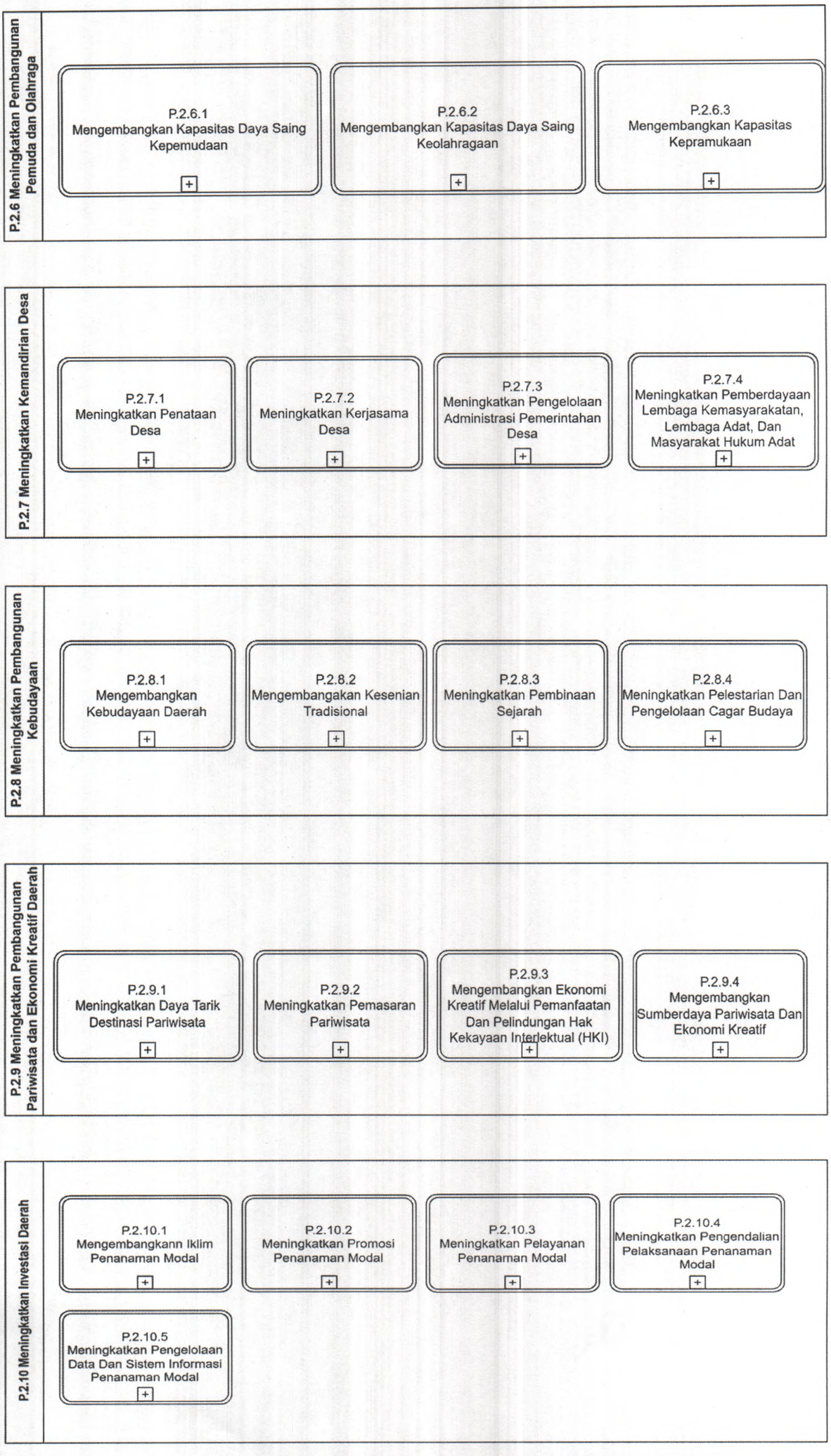
P.2.6 Meningkatkan Pembangunan Pemuda dan Olahraga
P.2.6.1 Mengembangkan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
P.2.6.2 Mengembangkan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
P.2.6.3 Mengembangkan Kapasitas Kepramukaan
P.2.7 Meningkatkan Kemandirian Desa
P.2.7.1 Meningkatkan Penataan Desa
P.2.7.2 Meningkatkan Kerjasama Desa
P.2.7.3 Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa
P.2.7.4 Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat
P.2.8 Meningkatkan Pembangunan Kebudayaan
P.2.8.1 Mengembangkan Kebudayaan Daerah
P.2.8.2 Mengembangakan Kesenian Tradisional
P.2.8.3 Meningkatkan Pembinaan Sejarah
P.2.8.4 Meningkatkan Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
P.2.9 Meningkatkan Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Daerah
P.2.9.1 Meningkatkan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
P.2.9.2 Meningkatkan Pemasaran Pariwisata
P.2.9.3 Mengembangkan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Pelindungan Hak Kekayaan Interlektual (HKI)
P.2.9.4 Mengembangkan Sumberdaya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
P.2.10 Meningkatkan Investasi Daerah
P.2.10.1 Mengembangkann Iklim Penanaman Modal
P.2.10.2 Meningkatkan Promosi Penanaman Modal
P.2.10.3 Meningkatkan Pelayanan Penanaman Modal
P.2.10.4 Meningkatkan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
P.2.10.5 Meningkatkan Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

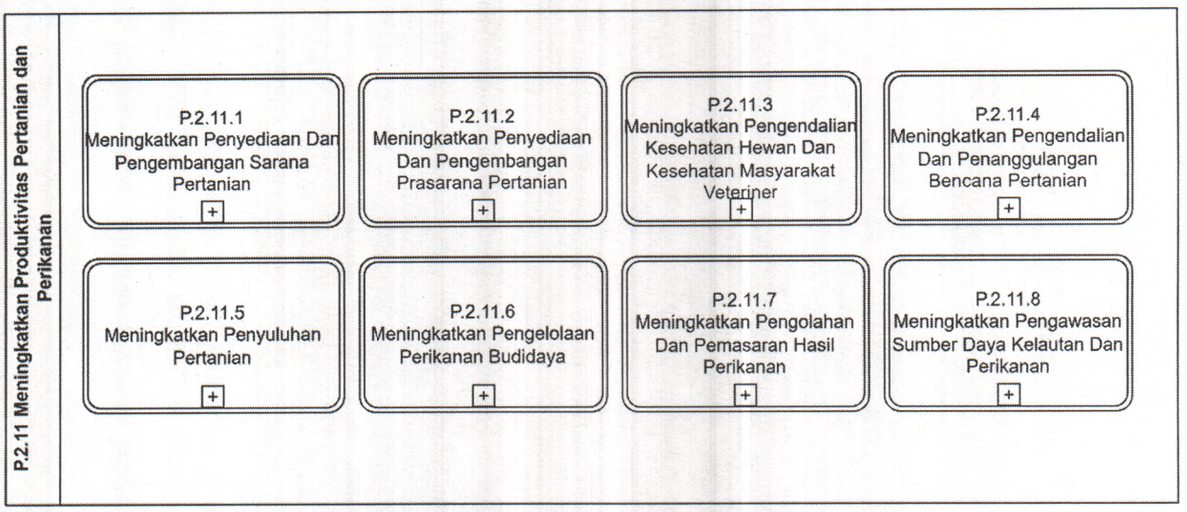
P.2.11 Meningkatkan Produktivitas Pertanian dan Perikanan
P.2.11.1 Meningkatkan Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
P.2.11.2 Meningkatkan Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
P.2.11.3 Meningkatkan Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
P.2.11.4 Meningkatkan Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
P.2.11.5 Meningkatkan Penyuluhan Pertanian
P.2.11.6 Meningkatkan Pengelolaan Perikanan Budidaya
P.2.11.7 Meningkatkan Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
P.2.11.8 Meningkatkan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

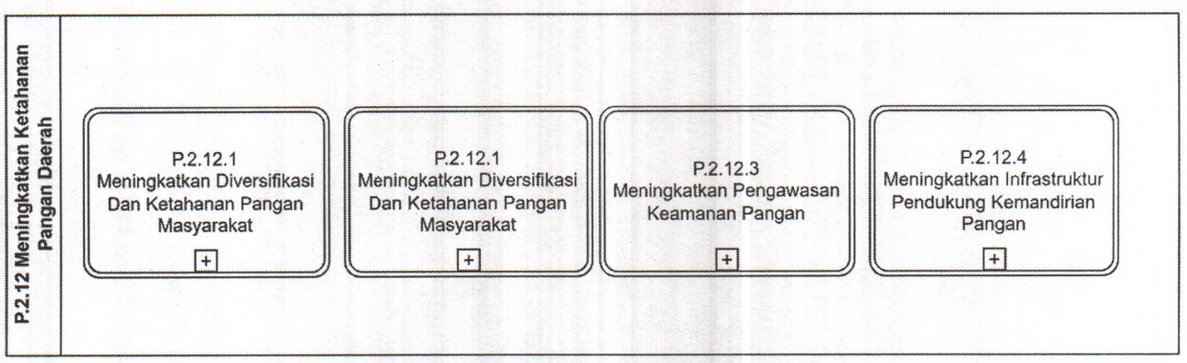
P.2.12 Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah
P.2.12.1 Meningkatkan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
P.2.12.1 Meningkatkan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
P.2.12.3 Meningkatkan Pengawasan Keamanan Pangan
P.2.12.4 Meningkatkan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan

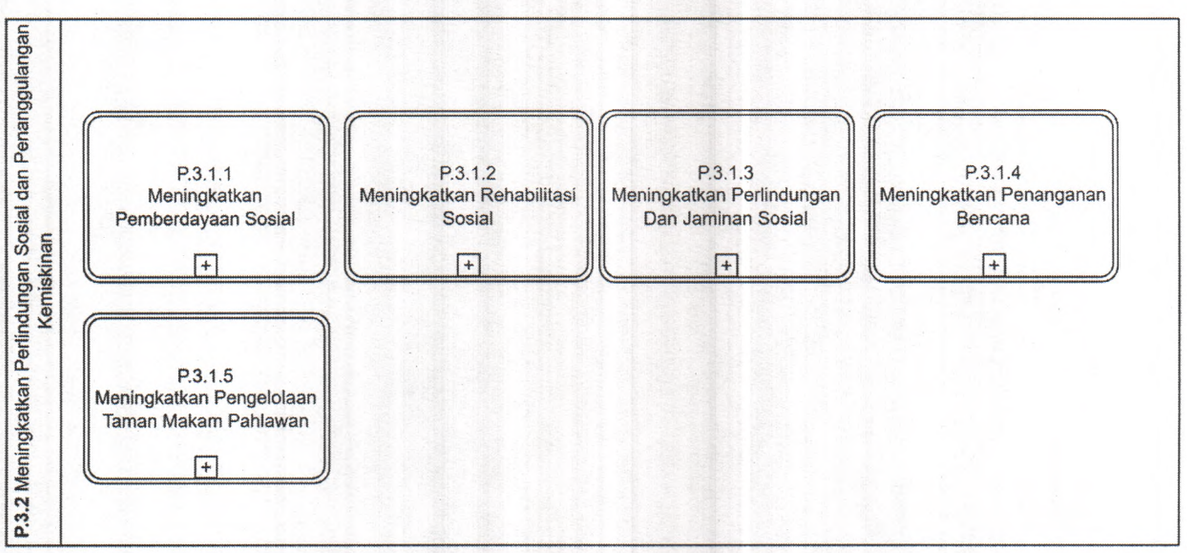
P.3.2 Meningkatkan Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
P.3.1.1 Meningkatkan Pemberdayaan Sosial
P.3.1.2 Meningkatkan Rehabilitasi Sosial
P.3.1.3 Meningkatkan Perlindungan Dan Jaminan Sosial
P.3.1.4 Meningkatkan Penanganan Bencana
P.3.1.5 Meningkatkan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

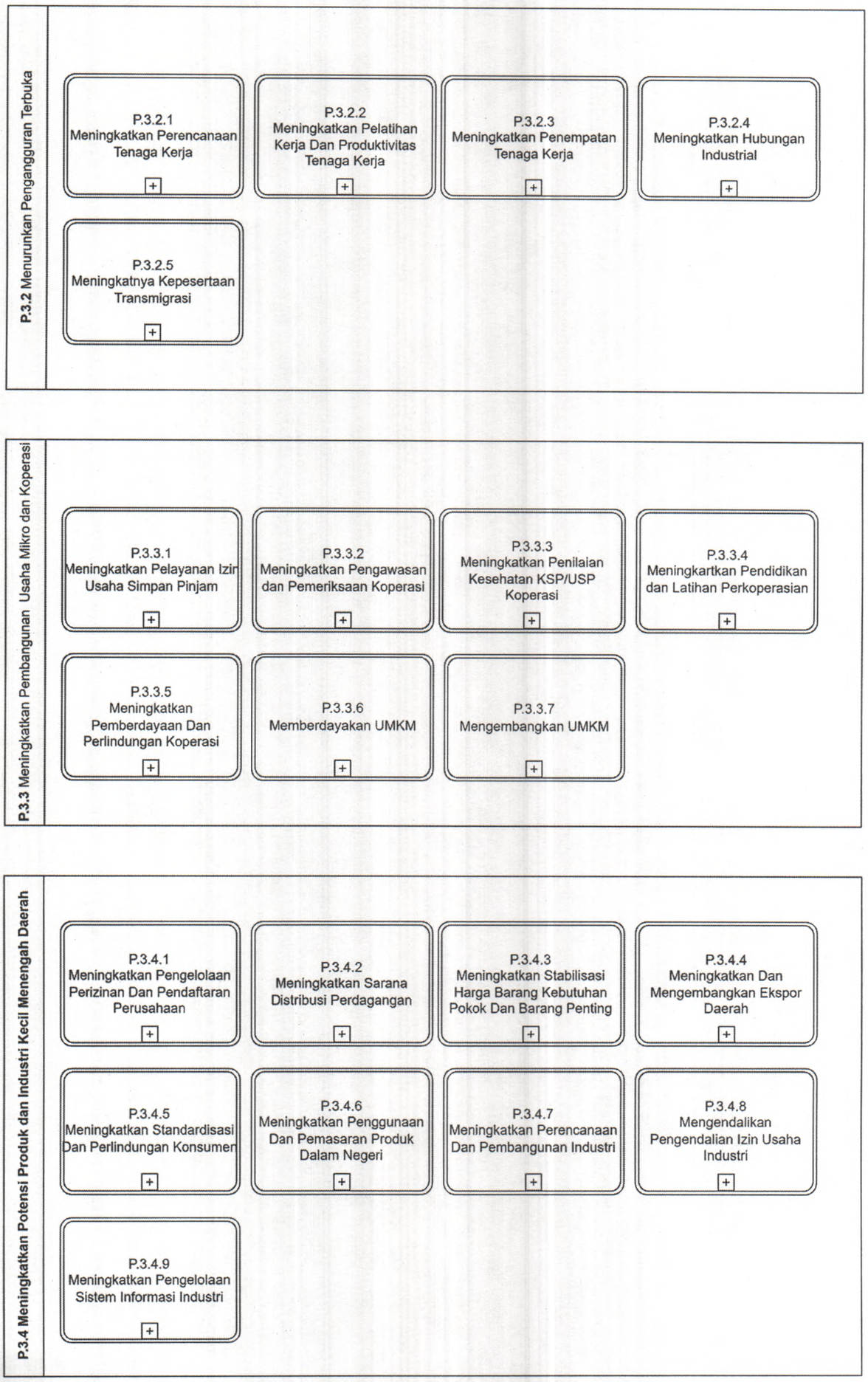
P.3.2 Menurunkan Pengangguran Terbuka
P.3.2.1 Meningkatkan Perencanaan Tenaga Kerja
P.3.2.2 Meningkatkan Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
P.3.2.3 Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja
P.3.2.4 Meningkatkan Hubungan Industrial
P.3.2.5 Meningkatnya Kepesertaan Transmigrasi
P.3.3 Meningkatkan Pembangunan Usaha Mikro dan Koperasi
P.3.3.1 Meningkatkan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
P.3.3.2 Meningkatkan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
P.3.3.3 Meningkatkan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
P.3.3.4 Meningkartkan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
P.3.3.5 Meningkatkan Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
P.3.3.6 Memberdayakan UMKM
P.3.3.7 Mengembangkan UMKM
P.3.4 Meningkatkan Potensi Produk dan Industri Kecil Menengah Daerah
P.3.4.1 Meningkatkan Pengelolaan Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
P.3.4.2 Meningkatkan Sarana Distribusi Perdagangan
P.3.4.3 Meningkatkan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
P.3.4.4 Meningkatkan Dan Mengembangkan Ekspor Daerah
P.3.4.5 Meningkatkan Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
P.3.4.6 Meningkatkan Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
P.3.4.7 Meningkatkan Perencanaan Dan Pembangunan Industri
P.3.4.8 Mengendalikan Pengendalian Izin Usaha Industri
P.3.4.9 Meningkatkan Pengelolaan Sistem Informasi Industri

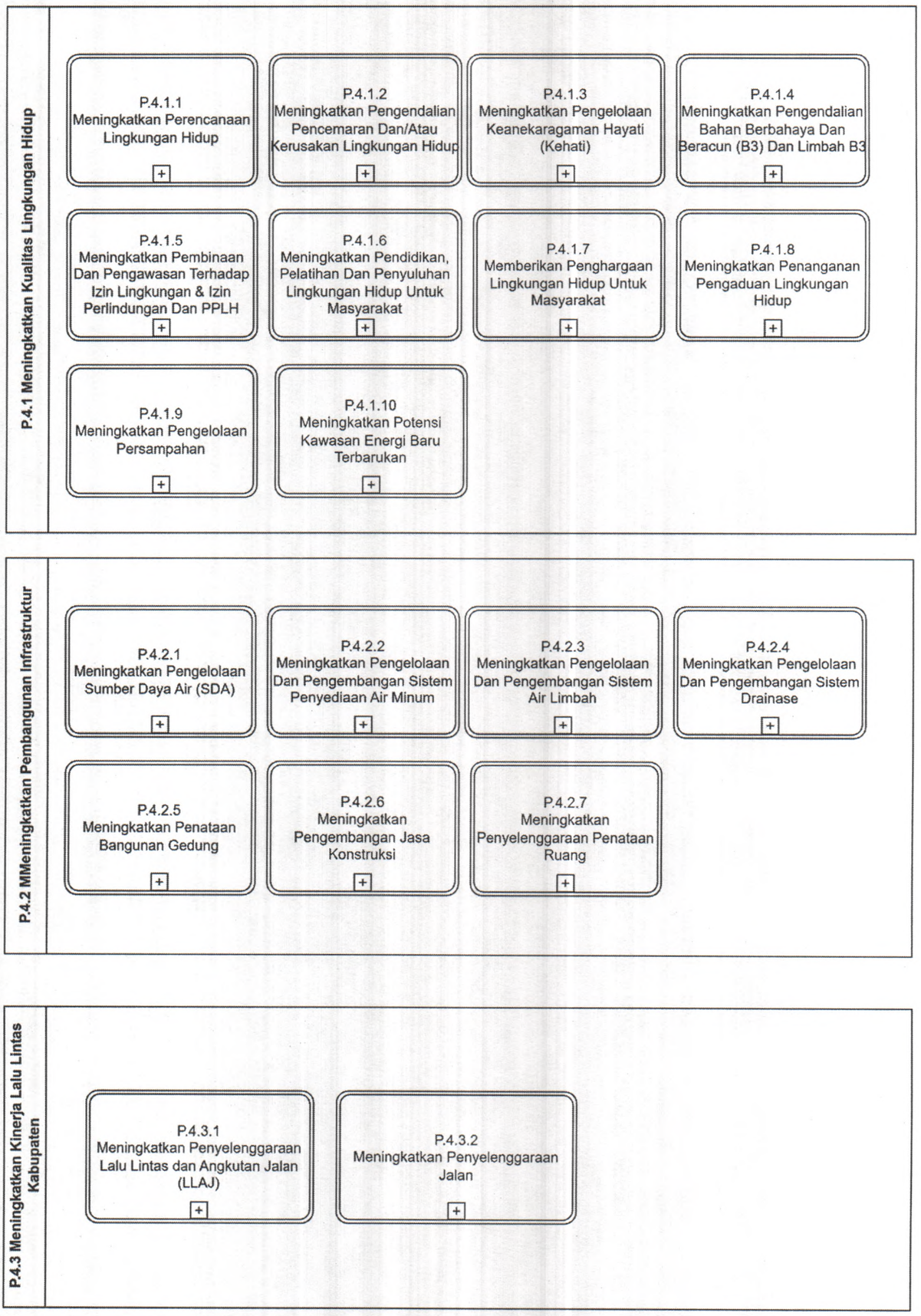
P.4.1 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
P.4.1.1 Meningkatkan Perencanaan Lingkungan Hidup
P.4.1.2 Meningkatkan Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
P.4.1.3 Meningkatkan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
P.4.1.4 Meningkatkan Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah B3
P.4.1.5 Meningkatkan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan & Izin Perlindungan Dan PPLH
P.4.1.6 Meningkatkan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
P.4.1.7 Memberikan Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
P.4.1.8 Meningkatkan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
P.4.1.9 Meningkatkan Pengelolaan Persampahan
P.4.1.10 Meningkatkan Potensi Kawasan Energi Baru Terbarukan
P.4.2 MMeningkatkan Pembangunan Infrastruktur
P.4.2.1 Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
P.4.2.2 Meningkatkan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
P.4.2.3 Meningkatkan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
P.4.2.4 Meningkatkan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
P.4.2.5 Meningkatkan Penataan Bangunan Gedung
P.4.2.6 Meningkatkan Pengembangan Jasa Konstruksi
P.4.2.7 Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang
P.4.3 Meningkatkan Kinerja Lalu Lintas Kabupaten
P.4.3.1 Meningkatkan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
P.4.3.2 Meningkatkan Penyelenggaraan Jalan

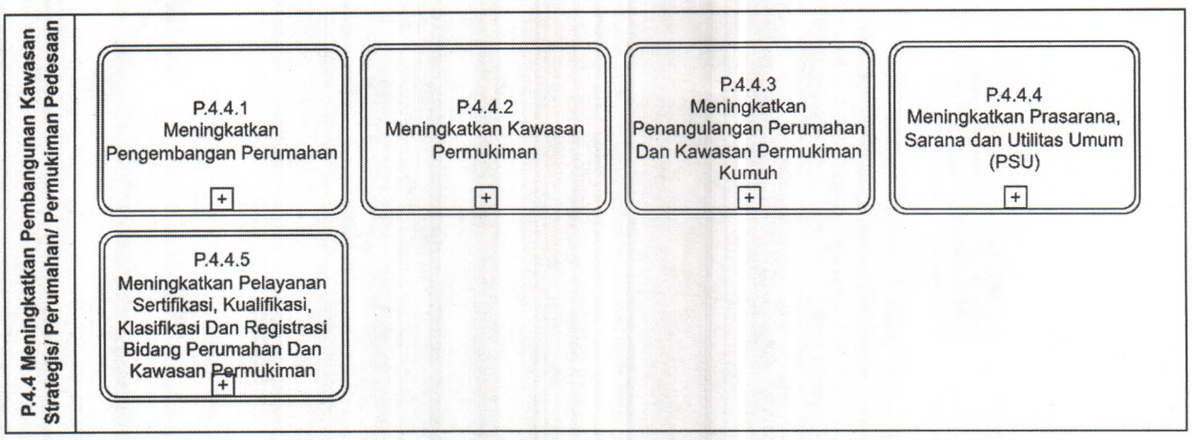

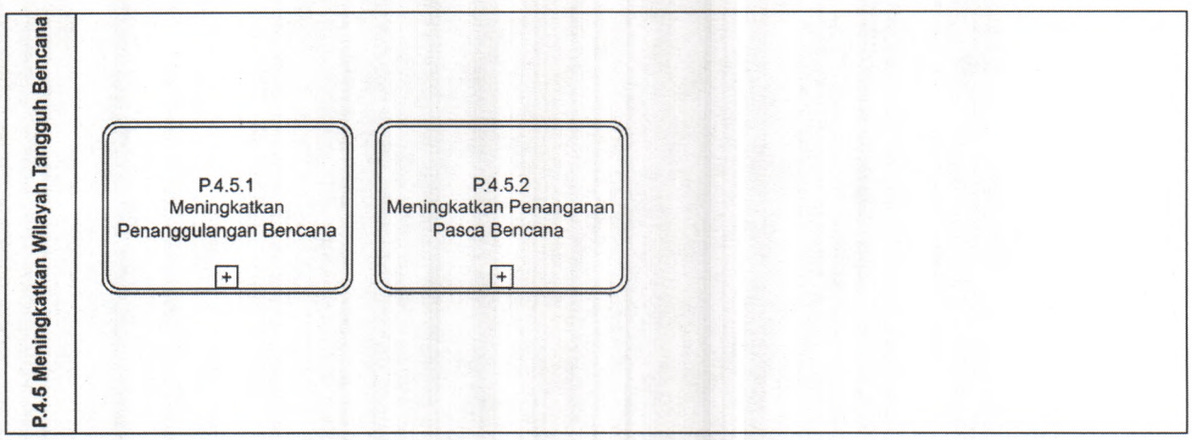

BUPATI KARANGANYAR,

ROBER CHRISTANTO